

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu Negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien diseluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah dapat berkurang dan diharapkan juga akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Smith (1985) dalam Hessel Nogi (2005:65) menjelaskan bahwa desentralisasi dapat juga dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk memobilisasi dukungan terhadap pembangunan Nasional dengan membuatnya lebih populer di tingkat daerah serta untuk memperoleh partisipasi yang lebih besar dari golongan masyarakat yang berbeda. Dengan demikian masyarakat daerah akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan lokal serta kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri.

Kaho (2001) dalam Hessel Nogi (2005:66) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan keuangan daerah ini, dalam UU Nomor 25 tahun 1999, yang termasuk dalam sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut: PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah (pasal 3). Berikut ini sumber-sumber penerimaan daerah:

1. Pendapatan asli daerah (PAD); merupakan pendapatan daerah dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (pasal 4).
2. Dana Perimbangan; dana ini merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan dari PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Berkenaan dengan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah dan berhubungan dengan penerimaan dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, maka peneliti melihat ada keterkaitan antara penerimaan dari sektor pariwisata dengan jumlah penerimaan yang diperoleh daerah khususnya di Kabupaten Ciamis.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa alam merupakan sumber daya yang tidak ternilai harganya, kita dapat menikmati dan memperoleh semua yang kita butuhkan dari alam, baik untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya, industri dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Keindahan alam yang terdapat di Indonesia merupakan aset bagi Negara dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber penghasilan Negara yang diperoleh dari kegiatan pariwisata.

Pariwisata dalam arti sempit adalah aktivitas atau praktek melakukan perjalanan untuk kepentingan penyegaran diri pribadi, untuk pendidikan atau untuk bersenang-senang. Sedangkan dalam arti luas JJ. Spillane (1991:13) mengartikan, sebagai berikut:

Pariwisata adalah bisnis menyediakan informasi, transportasi, akomodasi, dan pelayanan lainnya bagi para pejalan. Industri perjalanan dan pariwisata terbentuk dari perusahaan yang menyediakan pelayanan untuk semua tipe pejalan yang melakukan perjalanan untuk kepentingan bisnis dan bersenang-senang.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nyoman S. Pendit (1999) menyebutkan bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan pendapatan. Pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja dan mendorong kegiatan industri penunjang dan industri sampingan-sampingan lainnya.
2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
3. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional.

Kegiatan pariwisata ini sangat didukung dengan keadaan alam yang kita miliki karena sebagian besar objek pariwisata kita belum tercemar, dan iklim tropisnya yang mendukung kegiatan pariwisata sepanjang tahun, serta seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi yang mempercepat akses informasi mengenai keanekaragaman objek dan daya tarik wisata Indonesia memungkinkan untuk dapat menarik para wisatawan-wisatawan agar dapat berkunjung.

Seperti yang diungkapkan oleh JJ Spilane (1991) menyebutkan bahwa untuk menggalakan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, kepariwisataan diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan katalisator untuk mengembangkan sektor-sektor lain secara bertahap. Pengembangan pariwisata dapat merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling merangkai dan saling menunjang.

Peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya menurut Spillane (1991:56) berintikan dua segi, yaitu:

1. Segi ekonomi sebagai sumber devisa, pajak-pajak dan juga penciptaan kerja
2. Segi sosial kebudayaan dengan memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan

Dari segi ekonomi pariwisata merupakan sumber pendapatan bagi suatu daerah, karena sektor pariwisata saat ini sudah tidak berbeda dengan sektor ekonomi lainnya, maksudnya bahwa pariwisata juga merupakan suatu industri yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa, yang pada akhirnya digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan. Namun, sifat dan bentuk produk pariwisata berbeda dengan produk industri lain, karena itu faktor-faktor yang mempengaruhinya pun berbeda dengan industri lain. Seperti: hubungan politik, ekonomi, situasi, cuaca, iklim, hari libur, teknologi, transportasi dan lain sebagainya.

Kabupaten Ciamis yang terletak disebelah Timur di Propinsi Jawa Barat, mempunyai banyak sekali objek wisata yang dapat dijadikan tujuan pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis, dari mulai (1) Objek wisata

budaya; seperti Situ Lengkong Panjalu, Astana Gedé, Karangalmulyan, Kampung Kuta, dan Urug Kasang. (2) Objek wisata alam; seperti Pelatar Agung, Karapyak, Majingklak, Lembah Putri, Pangandaran, Cagar Alam Pananjung, Batu Hiu, Batukaras dll. Serta (3) Objek wisata minat khusus; seperti Curug Tujuh, Karang Nini, Citumang, Goa Donan dan Cukang Taneuh yang lebih dikenal disebut Green Canyon. Beragamnya objek pariwisata yang ada di daerah ini dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan Kabupaten Ciamis.

Daya tarik objek wisata akan menentukan pilihan bagi para wisatawan menyangkut apakah ia akan menjadikannya sebagai tujuan wisata atau tidak. Oleh karena itu, semakin menarik suatu objek wisata akan mendorong semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung. Berikut ini adalah data jumlah wisatawan yang berkunjung ke sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Ciamis:

Tabel 1.1
Jumlah Pengunjung Tahun 1996-2005

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing	Jumlah	Perkembangan
1996	762.138	7.898	770.036	-
1997	903.032	39.694	942.726	22,4 %
1998	759.954	18.309	778.263	-17,4 %
1999	1.73.684	11.472	1.485.120	90,8 %
2000	1.365.384	8.988	1.374.372	-7,4 %
2001	1.465.962	9.846	1.475.808	7,3 %
2002	1.605.772	8.562	1.614.334	9,3 %
2003	1.416.450	4.213	1.420.665	-11,9 %
2004	1.432.213	14.979	1.447.292	1,8 %
2005	958.759	7.598	966.292	-33,2 %

Sumber: Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab. Ciamis

Turunnya permintaan/pengunjung terhadap objek wisata ini menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, ada beberapa alasan baik ekonomis maupun non ekonomis, faktor-faktor tersebut antara lain adalah (1) ketakutan orang berwisata ke pantai karena terjadinya bencana nasional tsunami di Aceh, (2) Upaya promosi yang terhambat karena adanya kenaikan harga BBM (3) Situasi nasional yang menyangkut keamanan dengan adanya ledakan bom Bali yang menyebabkan turunnya tingkat kunjungan terutama turis asing yaitu kurang dari 15 ribu selama tahun 2005 jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor pariwisata yang kini telah menjelma sebagai sebuah industri, jadi sama halnya dengan industri-industri lain yang dalam pengelolaannya membutuhkan suatu kegiatan untuk memperoleh pendapatan. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan pendapatan adalah dengan upaya promosi, hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan permintaan jasa.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Komarudin Satradipoera (2003) bahwa "Promosi adalah pencarian peluang-peluang usaha dan organisasi dana, harta kekayaan dan kemampuan manajemen untuk terjun ke dalam usaha dengan tujuan untuk mencari laba".

Selain upaya promosi yang harus ditingkatkan untuk menaikkan permintaan jasa wisata, dan investasi yang dilakukan untuk memenuhi infrastruktur atau sarana dan prasarana di objek wisata tersebut seperti jalan, fasilitas serta kondisi sarana dan prasarana yang memadai juga bisa berpengaruh terhadap permintaan jasa wisata.

Dengan adanya promosi, serta didukung dengan keadaan infrastruktur yang memadai akan semakin banyak orang yang mengenal produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin banyak orang yang membeli produk atau jasa maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh. Berikut ini adalah jumlah pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata Kabupaten Ciamis periode 1999-2005:

Tabel 1.2
Jumlah Realisasi Pendapatan yang di Terima
Tahun Anggaran 1996-2005

Tahun	Jumlah (Rp)	Persentase
1996	1.259.256.150	--
1997	1.616.620.190	28
1998	1.338.415.010	-17
1999	2.512.960.950	87
2000	2.165.531.342	-13
2001	2.330.930.290	7
2002	2.577.272.082	10
2003	3.204.482.474	24
2004	3.474.041.380	8
2005	1.626.198.090	-53

Sumber: Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab. Ciamis

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pendapatan dari sektor pariwisata Kabupaten Ciamis. Hal ini diduga karena adanya penurunan dari permintaan terhadap jasa wisata sebagai akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya usaha promosi, keadaan infrastruktur, kondisi sarana dan prasarana, pendapatan konsumen, harga, selera konsumen. Serta adanya investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pariwisata baik untuk promosi maupun perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di objek wisata.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang mengapa terjadinya penurunan pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Ciamis, tetapi karena adanya keterbatasan data dan kekurangan yang ada pada penulis sendiri, maka peneliti membatasi penelitian ini dan sekaligus alasan penulis untuk memilih judul: **Pengaruh Pembiayaan Pemerintah Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Jasa Pariwisata (Studi di Kabupaten Ciamis).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh biaya promosi terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pengaruh biaya sarana dan prasarana terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kabupaten Ciamis?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh biaya promosi terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh biaya sarana dan prasarana terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kabupaten Ciamis.

2.1.1 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang serta Pendapatan Asli Daerah dari sektor kepariwisataan

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengelola kepariwisataan agar dapat meningkatkan kemajuan dalam pengelolaan kepariwisataannya, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi sehubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya setiap organisasi dari suatu kedinasan dengan kekuasaan lebih tinggi mempunyai wewenang untuk mengawasi organisasi (Prinsip Hirarkis). Berdasarkan hal tersebut suatu organisasi dapat memberikan wewenang kepada satuan yang ada dibawahnya, sehingga dalam mengatur, mengurus, memproses kegiatan akhirnya menjadi tanggung jawab yang hiraknya lebih rendah.

Tanggung jawab urusan rumah tangga daerah adalah urusan atau kegiatan yang diserahkan melalui perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah Tingkat I, dan dari Tingkat I diserahkan kepada Daerah Tingkat II. Kekuasaan tersebut bersumber pada wewenang formal yang

memberikan kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu.

Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (otonomi daerah) bertujuan untuk meningkatkan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, seperti dikemukakan oleh Kaho (2001) dalam Kiki Ach. Zakiyah (1997:15), sebagai berikut:

1. Pertimbangan Situasi

Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar maupun kecil yang mempunyai keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat dan kebiasaan lainnya. Oleh sebab itu penanganannya akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh unit atau perangkat pemerintahan yang ada di setiap wilayah.

2. Pertimbangan sejarah

Dalam menyusun sistem pemerintahan perlu diperhatikan juga mengenai sejarah Negara dan berbagai pengalaman pemerintah yang lalu.

3. Pertimbangan Politik dan Psikologi

Daerah memerlukan pemerintahan tersendiri untuk memberikan rasa tanggung jawab sekaligus memberi kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan, sebagai perwujudan semangat dan jiwa berbangsa Indonesia.

4. Pertimbangan Teknis Pemerintahan

Berdasarkan prinsip dan tujuan penyelenggaraan Negara republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, maka dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perangkat pemerintahan di daerah karena disadari bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintahan pusat. Perangkat pemerintah di daerah adalah sebagai bagian dari mekanisme pemerintah pusat dan bukan merupakan Negara bagian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara umum Kaho (2001) menyebutkan bahwa persyaratan yang diperlukan bagi pelimpahan wewenang (otonomi daerah) adalah sebagai berikut:

1. Manusia harus cukup baik
2. Keuangan harus cukup baik
3. Peralatan harus cukup baik
4. Organisasi serta manajemen harus cukup baik

Sehubungan dengan faktor keuangan tersebut, maka setiap daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai. Dan salah satu sumber keuangan untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah adalah dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah.

Adanya pendapatan yang diperoleh pemerintah tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Keynes bahwa "*Besarnya perubahan pendapatan keseimbangan jika investasi atau pengeluaran pemerintah berubah*". Atau secara matematis dapat ditulis:

$$\Delta Y = \alpha_I (\Delta I) = \alpha_G (\Delta G)$$

Dimana:

Y : Pendapatan

I : Investasi

G : Pengeluaran Pemerintah

Kaho (2001) dalam Hessel Nogi menyebutkan sumber Pendapatan Asli

Daerah adalah diperoleh dari:

“(1) Sumber Pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber perpajakan daerah, (2) Penerimaan dari opsen pajak adalah bagi hasil pajak, (3) Penerimaan dari subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat, (4) Penerimaan dari perusahaan”.

Sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh Kaho, Nick Devas (1989:31)

juga mengemukakan bahwa:

“Pendapatan asli daerah sendiri terdiri atas pajak daerah (23%), pungutan jasa layanan (49%), iuran dan penerimaan dari dinas-dinas (9%), laba perusahaan daerah (2%), penerimaan pembangunan (8%) dan penerimaan lain-lain (9%)”.

Nick Devas (1989:31) menyebutkan bahwa kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah mencakup berbagai penerimaan kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun, walau demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri. Pendapatan daerah dapat ditingkatkan melalui peningkatan PAD berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang di ubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang”.

Peningkatan PAD ini tidak terlepas dari peningkatan komponen-komponen lain dari PAD itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 komponen itu terdiri dari:

- a. Pajak daerah, seperti: pajak kendaraan bermotor, PBB dan lain-lain.
- b. Retribusi daerah, seperti: Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan lain-lain.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti: bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD), bagian laba Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yaitu semua PAD yang bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: hasil penjualan barang milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah.

Dengan demikian jelas bahwa sumber-sumber penerimaan daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu komponen dari pendapatan asli daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, yang diantaranya diperoleh dari objek wisata daerah yang ada di daerah tersebut melalui kegiatan pariwisata.

Pariwisata pada saat ini sudah menjadi tumpuan harapan pemasukan devisa yang cukup besar bagi Negara. Dan sekarang ini pariwisata sudah menjelma menjadi industri yang bergerak dalam bidang jasa, yang disebut dengan industri pariwisata, oleh sebab itu industri pariwisata berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi karena ada permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Menurut Nyoman S. Pendit (1999:3) memberikan definisi pariwisata sebagai berikut:

“Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup sertamenstimulasi sektor-sektor produktifitas lainnya. Selanjutnya sebagai sector yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya, seperti industri kerajinan tangan dan cenderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri”.

Dalam industri kepariwisataan jelaslah bahwa wisatawan yang mempunyai kebutuhan dan permintaan-permintaan yang harus dipenuhi dan untuk itu para pengelola objek wisata mengeluarkan pengorbanan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut yaitu berupa biaya yang dikeluarkan untuk dapat menarik para wisatawan tersebut..

Samuelson dan Nordhaus (1996:62) memberikan penjelasan tentang pengertian penawaran, yaitu:

“Penawaran suatu barang dan jasa diartikan sebagai banyaknya barang dan jasa yang ditawarkan dan akan diproduksi dan dijual oleh perusahaan”.

Penawaran ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menarik wisatawan, diantaranya dengan cara promosi. Dengan adanya promosi diharapkan masyarakat akan semakin mengenal tentang kepariwisataan dan akan berkunjung ke objek

wisata yang ada. Semakin banyak orang yang berkunjung maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh. Komarudin Sastradipeora (2003) mengemukakan bahwa:

“Promosi adalah pencarian peluang-peluang usaha dan organisasi dana, harta kekayaan dan kemampuan manajemen untuk terjun kedalam usaha dengan tujuan untuk mencari laba”.

Promosi yang dilakukan dengan tepat dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan promosi merupakan alat untuk mengalihkan perhatian konsumen terhadap suatu barang yang sebelumnya dan juga merupakan alat informasi untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa.

Berhasilnya suatu kegiatan promosi tidak terlepas dari sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh badan/perusahaan seperti yang dikatakan oleh Siswanto (1991) dalam Amirullah (2002:58)

“Tiap jenis kegiatan promosi produk maupun tiap jenis media komunikasi mempunyai beban tersendiri, beban biaya tersebut seringkali merupakan beban biaya minimal oleh karena itu sebelum memutuskan jenis media komunikasi apa yang akan dipilih, perlulah setiap badan/perusahaan mempertimbangkan jumlah dana promosi produk atau jasa yang tersedia untuk tiap jangka waktu tertentu”.

Mulyadi dalam Ujang Suwarman (2003) juga mengemukakan bahwa ada 4 unsur dalam definisi biaya tersebut, yaitu:

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu dalam hal ini adalah untuk menaikkan pendapatan.

Faktor selanjutnya yang dapat digunakan untuk menarik para pengunjung adalah kondisi sarana dan prasarana yang memadai. Infrastruktur atau sarana dan prasarana adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang dan dapat melengkapi sarana pokok yang berfungsi untuk dapat menarik atau membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah objek wisata, seperti kondisi jalan, fasilitas penginapan, dan lain-lain. Semakin baik dan lengkap sarana dan prasarana yang tersedia di objek wisata akan dapat menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung.

Menurut Nyoman S.Pendit yang dimaksud dengan sarana kepariwisataan adalah:

1. Perusahaan akomodasi dengan segala bentuk corak dan juga lokasinya.
2. Tempat peristirahatan khusus bagi penunjang yang sakit.
3. Perusahaan pengangkutan kepariwisataan.
4. Perusahaan manufaktur seperti perusahaan kerajinan tangan.
5. Toko-toko yang menjual souvenir
6. Lembaga yang khusus untuk promosi pariwisata.

Berbeda dengan permintaan suatu barang, dalam jasa bahan baku inti untuk menghasilkan suatu jasa adalah orang, seperti yang dikemukakan oleh Steinhoff (1979) dalam Buchari Alma menyebutkan "*The raw material of service is people*". Karena itu dalam suatu industri yang bergerak dalam bidang jasa yang diutamakan adalah bagaimana konsumen dapat mencapai kepuasan dari jasa yang diberikan, baik itu melalui infrastruktur atau sarana yang memadai atau pelayanan yang diberikan.

Terdapat perbedaan karakteristik antara produk berupa jasa dengan produk berupa barang. Edward W. Wheatley dalam Buchari Alma (2002:244) menjelaskan beberapa perbedaan antara jasa dengan barang, yaitu:

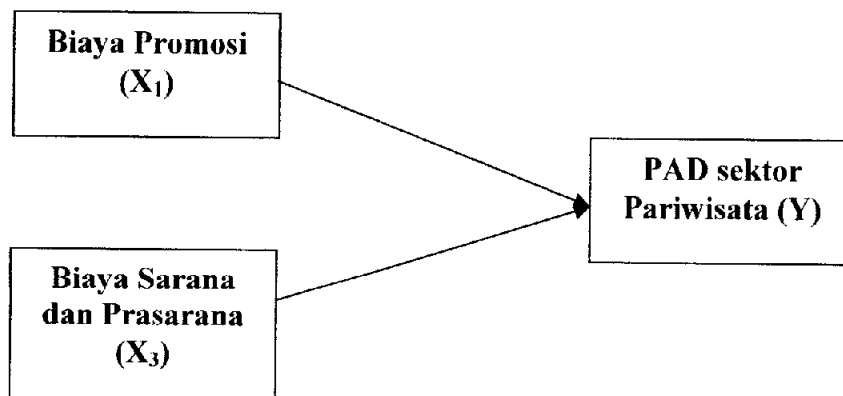
- (1) Pembelian jasa sangat dipengaruhi motif yang didorong oleh emosi.
- (2) Jasa bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat berwujud, dapat dilihat, dirasa dan sebagainya.
- (3) Barang bersifat tahan lama, tetapi jasa tidak, jasa dibeli dan dikonsumsi pada waktu yang sama.
- (4) Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan
- (5) Ramalan permintaan dalam marketing barang merupakan masalah, tidak demikian halnya dengan marketing jasa, untuk menghadapi masa-masa puncak dapat dilatih tenaga khusus.
- (6) Adanya masa puncak yang sangat padat, merupakan masalah tersendiri bagi marketing jasa. Pada masa puncak, ada kemungkinan layanan yang diberikan oleh produsen sangat minim, misalnya waktunya dipersingkat agar dapat melayani langganan sebanyak mungkin. Jika mutu jasanya tidak terkontrol maka ini dapat berakibat negative terhadap perusahaan, karena banyak langganan yang merasa tidak puas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata bergantung pada tingkat permintaan terhadap objek wisata, agar tingkat permintaan meningkat maka perlu adanya pengenalan produk kepada masyarakat dan kondisi sarana dan prasarana yang memadai. Pengenalan produk kepada masyarakat ini salah satunya dilakukan dengan promosi dan

kondisi sarana dan prasarana yang memadai dengan adanya biaya pemeliharaan yang dilakukan pemerintah daerah baik untuk melengkapi ataupun untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang telah ada.

Semakin masyarakat mengenal kepariwisataan suatu daerah dan yakin akan keunggulannya serta kondisi sarana dan prasana yang semakin baik maka semakin sering pula masyarakat melakukan kunjungan yang akan meningkatkan permintaan terhadap jasa wisata sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut atau yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan teori-teori dan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu penulis mencoba untuk meneliti pengaruh promosi, kondisi sarana dan prasarana terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Dari hal tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah anggapan dasar terhadap suatu masalah. Dan hipotesis menurut Sugiyono (2003:194) yaitu suatu jawaban yang sifatnya sementara. Berdasarkan masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah "*Biaya promosi dan biaya sarana dan prasarana berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata*".

Hipotesis minor:

1. Biaya promosi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Kabupaten Ciamis
2. Biaya sarana dan prasana berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Kabupaten Ciamis.

